

PEMDES CIPELEM BREBES MENYEBUT AKAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN TALUD JUT DI RT 01 RW 02



Sumber Gambar:

<https://www.beritamerdekaonline.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240302-WA0079.jpg>

Isi Berita:

PORTAL BREBES - Pemerintah Desa (Pemdes) Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes mengaku akan melanjutkan pembangunan talud Jalan Usaha Tani (JUT) yang ada di lingkungan RT 01 RW 02.

Kesanggupan untuk melanjutkan pembangunan talud JUT tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Desa Cipelem Tomi Santoso, Minggu 3 Maret 2024.

Kepada awak media, Tomi menyebut kalau berdasarkan hasil perhitungan ulang dari konsultan, memang ada kekurangan volume pekerjaan talud JUT di RT 01 RW 02 sepanjang 60 meter.

Dimana, kalau diuangkan proyek tersebut hanya menyisakan anggaran sekitar Rp.15 juta. "Kita sebelumnya sudah mengundang Bapak Nurfaidin,ST sebagai konsultan teknis.

Dan dari hasil penghitungan beliau, hanya menyisakan volume pekerjaan 60 meter saja. Dan dari sisa volume tersebut, kami pun siap untuk menyelesaikannya," ujar Tomi.

Kepada wartawan, Tomi juga menceritakan tentang kronologis diberhentikannya proyek talud JUT di RT 01 RW 02. Dimana saat itu terjadi proyek warga/petani yang tengah melakukan masa tanam.

Dan untuk mendukung kelancaran warga dalam bertani, maka semua pihak sepakat untuk pembangunan talud JUT diberhentikan sementara lantaran dianggap mengganggu kegiatan tanam.

Disisi lain, tambah dia, bertepatan dengan itu juga sedang ada kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan untuk seluruh pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2023.

Dan dari hasil monev tersebut, tim lapangan menemukan adanya kelebihan pekerjaan yang sama di titik lain, tepatnya di RW 06. Atas kelebihan pekerjaan itu, tim Monev kemudian merekomendasikan agar pekerjaan dihentikan.*** (Harviyanto)

Sumber Berita:

1. <https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/brebesan/pr-1267789744/pemdes-cipelem-menyebut-akan-melanjutkan-pembangunan-talud-jut-di-rt-01-rw-02?page=2>, “Pemdes Cipelem Menyebut Akan Melanjutkan Pembangunan Talud JUT di RT 01 RW 02”, tanggal 3 Maret 2024.
2. <https://beritafakta.id/semptat-berhenti-pemdes-cipelem-menyebut-pembangunan-talud-jut-desa-cipelem-kembali-dilanjutkan/>, “Semptat Berhenti, Pemdes Cipelem Menyebut Pembangunan Talud JUT Desa Cipelem Kembali Dilanjutkan”, tanggal 3 Maret 2024.
3. <https://www.beritamerdekaonline.com/2024/03/proyek-talud-jut-dari-anggaran-dana-desa-cipelem-kecamatan-bulakamba-tahun-2023-diduga-mangkrak/>, “Proyek Talud JUT dari Anggaran Dana Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba Tahun 2023 Diduga Mangkrak”, tanggal 2 Maret 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi